

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda G. 2022. KPK RI Tetapkan Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi. (<https://news.republika.co.id/berita/rm5d98423/kpk-ri-tetapkan-nagari-kamang-hilia-sebagai-des-antikorupsi?> pada tanggal 31 Agustus 2024).
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta:BPS.
- Badriy. 2021. KPK gandeng Kemendes PDTT luncurkan desa antikorupsi. (<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4085/kpk-gandeng-kemendes-pdtt-luncurkan-des-antikorupsi> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024).
- Dewi K.R., Hardiyanto S. 2022. Menilik kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernahhabis. (https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/17/100500965/menilik_kasus-korupsi-di-indonesia-yang-tidak-pernah-habis-?page=all diakses tanggal 31 Agustus 2024).
- Diskominfo Agam. 2022. Nagari Kamang Hilia Raih Nilai 93.25 dengan Predikat Istimewa Desa Anti Korupsi oleh KPK RI (<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/8763/nagari-kamang-hilia-raih-nilai-9325-dengan-predikat-istimewa-des-anti-korupsi-oleh-kpk-ri.html> diakses pada tanggal 2 September 2024).
- Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. 2023. Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193-201.
- Kemendikbud, R. I. 2013. *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*.
- Mahardhika, V., Astuti, P., Rusdiana, E., Ahmad, G. A., & Hikmah, N. 2023. Peningkatan Pemahaman Anti Korupsi Kepala Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Sebagai Upaya Mewujudkan Clean Government. *Civic Education Law And Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 43-54.
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. 2021. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan

- Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Governance*, 1(2), 1-12
- Muhammad H. 2022. Nagari Kamang Hilia Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional 2022. (<https://news.republika.co.id/berita/rd4t64380/nagari-kamang-hilia-jadi-desa-percontohan-antikorupsi-nasional-2022> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024)
- Muhammad, A. M. 2023. *Pelaksanaan Desa Anti Korupsi di Nagari Kamang Hilia Pada Tahun 2022* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Novria, N. 2023. *Strategi Nagari Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Peraturan Wali Nagari Kamang Hilia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial Tahun Anggaran 2022.
- Pimpinan, K. P. K., Sudjadi, K. K., Arham, A. D., Sulaiman, R. I., Aldian, H. J., Prodjotaruno, K., ... & Kav, J. K. P. 2021. Buku Panduan Desa Antikorupsi. Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2022. Pemberdayaan Desa Anti Korupsi. (<https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi> diakses pada tanggal 1 September 2024)
- Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPM: Yogyakarta.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Siregar, M. 2023. *Antikorupsi*. Surabaya: UWKS PRESS.
- Spector, B. I. 2016. The benefits of anti-corruption programming: implications for low to lower middle income countries. *Crime, Law and Social Change*, 65(4), 423-442.
- Sufaidi, A., Gerald, G., & Putri, R. Y. 2023. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 174-180.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

- Syauket, A., & Karsono, B. 2022. Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 16(2).
- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Wicipto, S. 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).hlm. 250
- Widjiastuti, A. 2017. Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. *Jurnal Perspektif*, 22(2), 96-110.

